

## BAB IV

### KESIMPULAN

Jepang menerapkan pembatasan ekspor bahan baku semikonduktor ke Korea Selatan tanpa sebab. Terdapat dua kepentingan yang mendorong Jepang dalam menerapkan pembatasan tersebut. Kepentingan yang pertama, yaitu sebagai tindakan balasan dan respon atas tuntutan ganti rugi yang diajukan Mahkamah Agung Korea Selatan kepada dua perusahaan Jepang, yaitu Mitsubishi Heavy Industries Limited dan Nippon Steel & Sumitomo Metal Corps (NSMM) untuk membayar kompensasi bagi korban kerja paksa. Hal ini dikarenakan Pemerintah Jepang menganggap bahwa tuntutan ganti rugi tersebut memberikan kerugian bagi kepentingan ekonomi Jepang dan telah melanggar perjanjian tahun 1965 yang merupakan dasar hukum yang menormalisasi hubungan diplomatik antara Korea Selatan dan Jepang sehingga Jepang membalas dengan tindakan yang dapat merugikan Korea Selatan, yakni dengan melakukan pembatasan ekspor bahan baku semikonduktor, yang sangat penting bagi industri semikonduktor Korea Selatan, mengingat negara tersebut bergantung pada bahan baku dari Jepang. Tindakan yang dilakukan oleh Jepang ini sesuai dengan konsep *reciprocity* (timbang balik), bahwa tindakan suatu negara akan dibalas dengan tindakan yang setara.

Kepentingan kedua, yaitu adanya keinginan Jepang untuk meningkatkan produktivitas industri semikonduktornya, terutama dalam produksi *chip* dan mengurangi ketergantungan impor *chip* dari negara lain. Keputusan Jepang melakukan pembatasan ekspor didorong oleh fakta bahwa posisi industri semikonduktor Jepang memburuk di pasar global dan kalah bersaing dengan perusahaan-perusahaan semikonduktor dari negara lain, terutama Korea Selatan, padahal sebelumnya Jepang pernah mendominasi industri semikonduktor dengan menguasai lebih dari 50% pangsa pasar global pada tahun 1980-an.

Selain itu, Jepang memiliki keinginan untuk meningkatkan daya saingnya sebagai produsen *chip* mutakhir dan produk-produk terkait, seperti AI dan 5G. Dengan membatasi ekspor bahan baku semikonduktor ke Korea Selatan, Jepang dapat memprioritaskan pasokan bahan baku bagi produsen-produsen semikonduktor dalam negerinya, sehingga mereka dapat meningkatkan produksi dan inovasi dalam teknologi semikonduktor, terutama dalam produksi *chip* dan teknologi AI dan 5G. Tindakan yang

dilakukan Jepang tersebut sejalan dengan neo-merkantilisme, yakni negara melindungi industri dalam negeri dari persaingan luar negeri dan menekankan kemandirian ekonomi. Selain itu, tindakan yang dilakukan Jepang tersebut sesuai dengan pandangan neo-merkantilisme bahwa negara menggunakan intervensi ekonomi untuk mendukung industri strategis dan mencapai kepentingannya.

